

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2014

## OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
  - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Pengurangan Pengangguran
  - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
  - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
  - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
  - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
  - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
  - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
  - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
  - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
  - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
  - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
  - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
  - 5.1 Isu Strategis Daerah
  - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH





# Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat 2014

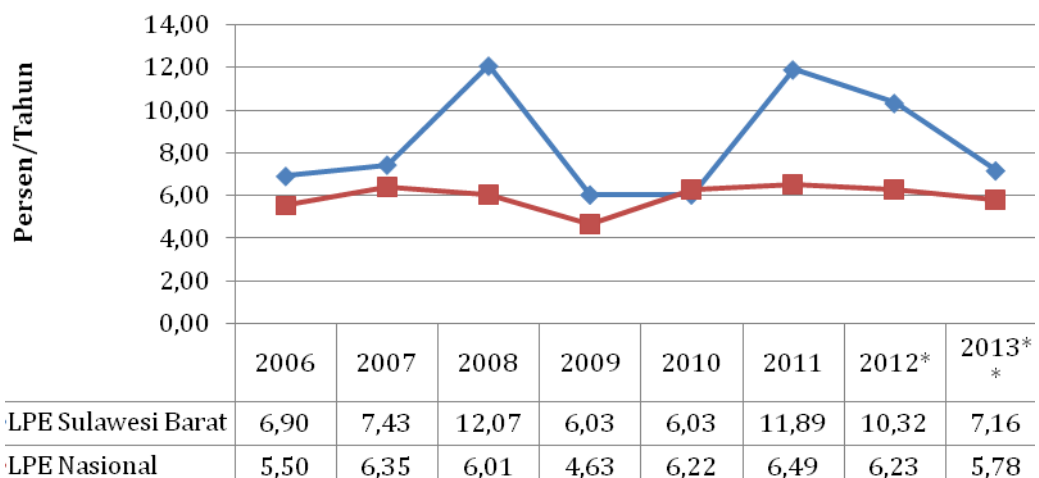
## SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Perkembangan Indikator Utama

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran nasional dan internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi wilayah ini. Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran strategis dalam mendukung peran Sulawesi di tingkat nasional sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel khususnya simpul perkebunan kakao dan simpul perikanan. Kinerja perekonomian Sulawesi Barat selama periode 2006-2013 berfluktuatif (Gambar 1), dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 8,48 persen pertahun, jauh melebihi laju pertumbuhan nasional dalam periode yang sama. Tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Potensi alam Sulawesi Barat merupakan modal utama untuk membangun dan meningkatkan pertumbuhannya. Di tingkat wilayah, pada tahun 2013 Provinsi Sulawesi Barat menyumbang 4,52 persen terhadap output PDRB Sulawesi, dan berkontribusi sebesar 0,21 persen terhadap pembentukan PDB nasional.

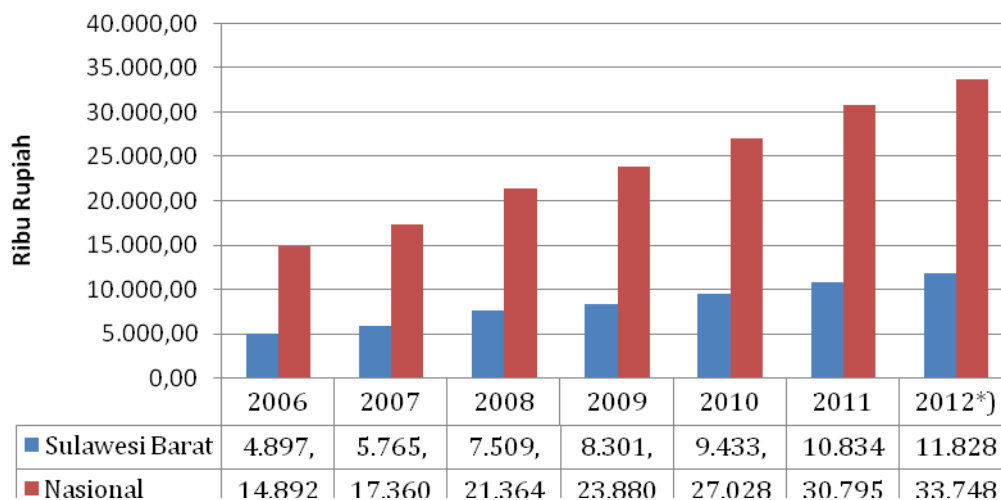
**Gambar 1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000**



Sumber : BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Sulawesi Barat berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Sulawesi Barat relatif lebih rendah secara nasional walaupun nilainya cenderung meningkat. Laju pertumbuhan yang tinggi belum cukup mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita di Sulawesi Barat dari angka rata-rata nasional (Gambar 2). Apabila pertumbuhan penduduk antar provinsi tidak terlalu berbeda jauh, kinerja rata-rata provinsi lain berkembang lebih besar daripada Sulawesi Barat.

**Gambar 2**  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

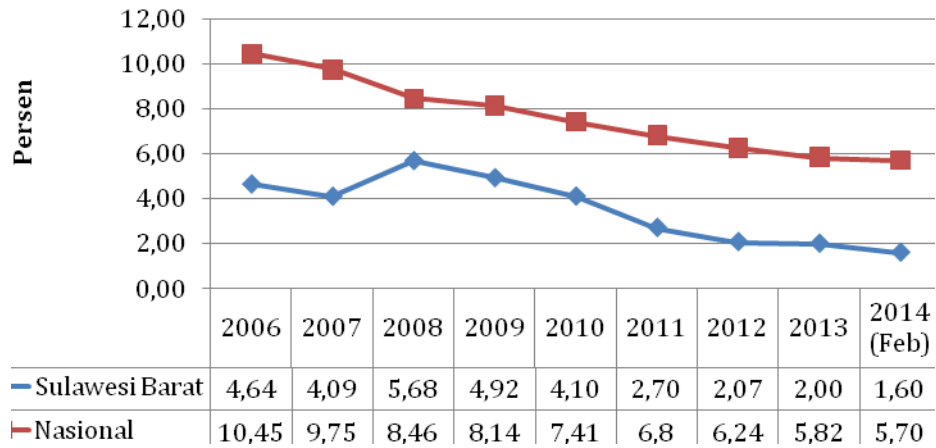


Sumber : BPS, 2013

## 2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Barat selama 2006-2013 berkurang sebesar 2,64 persen. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun. TPT Sulawesi Barat selama periode tahun 2006-2014 (Feb) termasuk rendah, dan lebih rendah dibandingkan dengan TPT nasional (Gambar 3). Menurunnya TPT di Sulawesi Barat selain karena kontribusi sektor pertanian yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat juga tumbuhnya sektor jasa di beberapa kota dan kabupaten di wilayah ini. Namun rendahnya tingkat pengangguran dengan pendapatan perkapita yang rendah di Sulawesi Barat mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah. Kualitas pekerjaan yang tersedia di daerah perlu ditelusuri lebih lanjut.

**Gambar 3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**

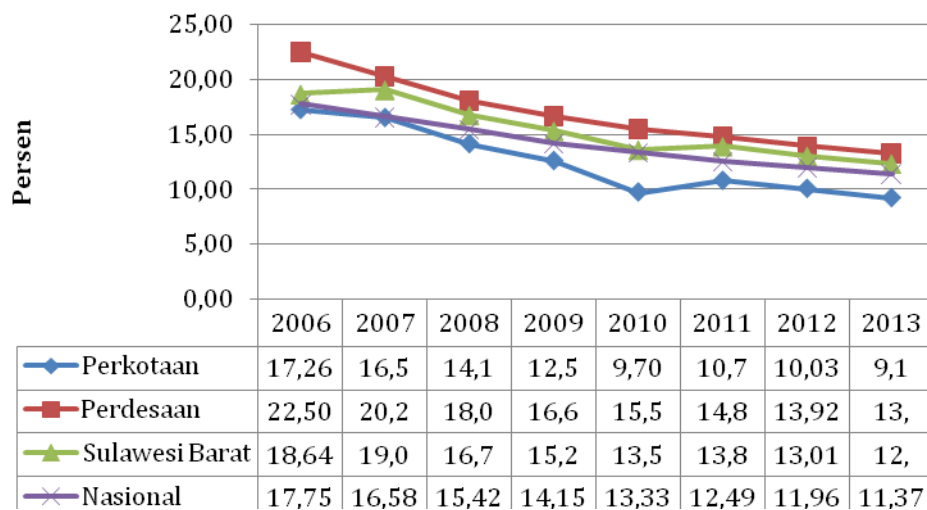


Sumber : BPS, 2014

### 3. Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak positif bagi penurunan kemiskinan wilayah. Selama periode 2006-2013 persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat cenderung menurun dan mencapai 12,30 persen pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat selalu lebih tinggi dibandingkan nasional, kecuali di perkotaan. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 9,19 persen, di perdesaan mencapai 13,27 persen, sedangkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 11,37 persen (Gambar 4). Untuk mengurangi kemiskinan di perdesaan diperlukan upaya dalam menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi rakyat miskin.

**Gambar 4**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Sumber: BPS, 2013

## B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

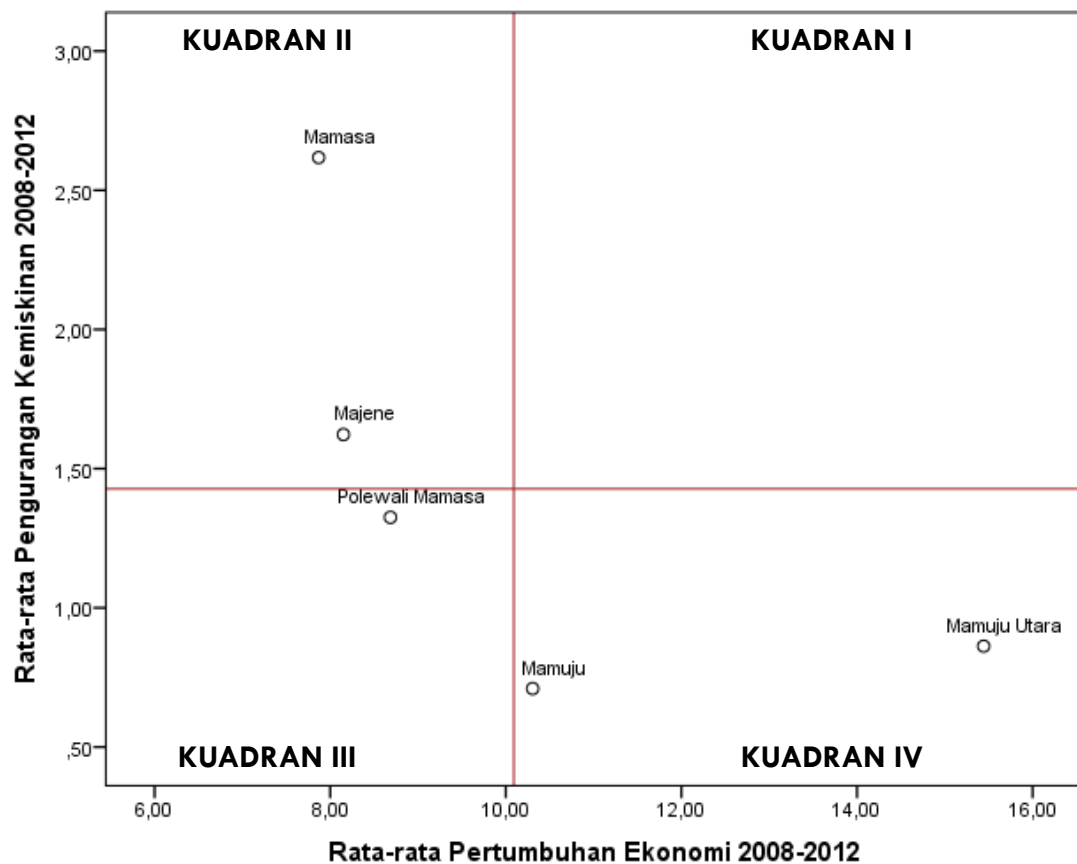
Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut.

*Pertama*, tidak ada kota/ kabupaten di Sulawesi Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Pada kuadran I ini pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan..

**Gambar 5**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin**  
**Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Kedua*, kabupaten Mamasa dan Majene terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

*Ketiga*, Polewali Mamasa terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

*Keempat*, Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

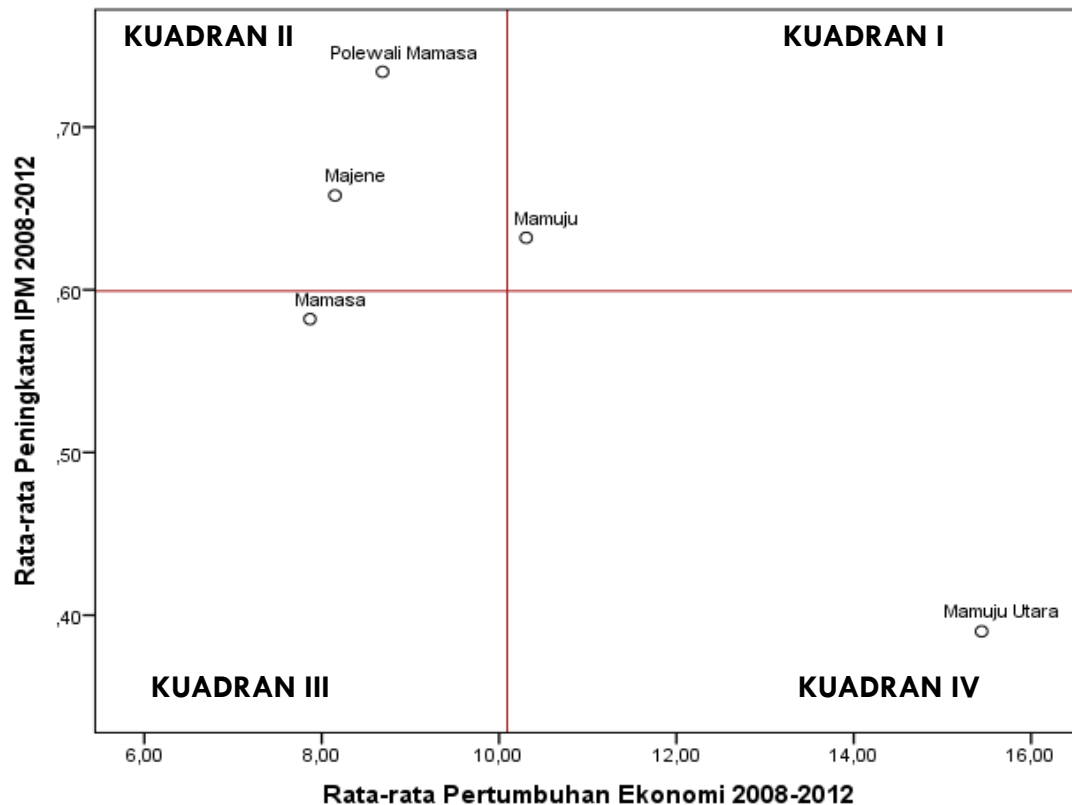
Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Mamuju merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

*Kedua*, Kabupaten Majene dan Polewali Mamasa terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.



*Ketiga*, Kabupaten Mamasa terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Keempat*, Kabupaten Mamuju Utara terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik

### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

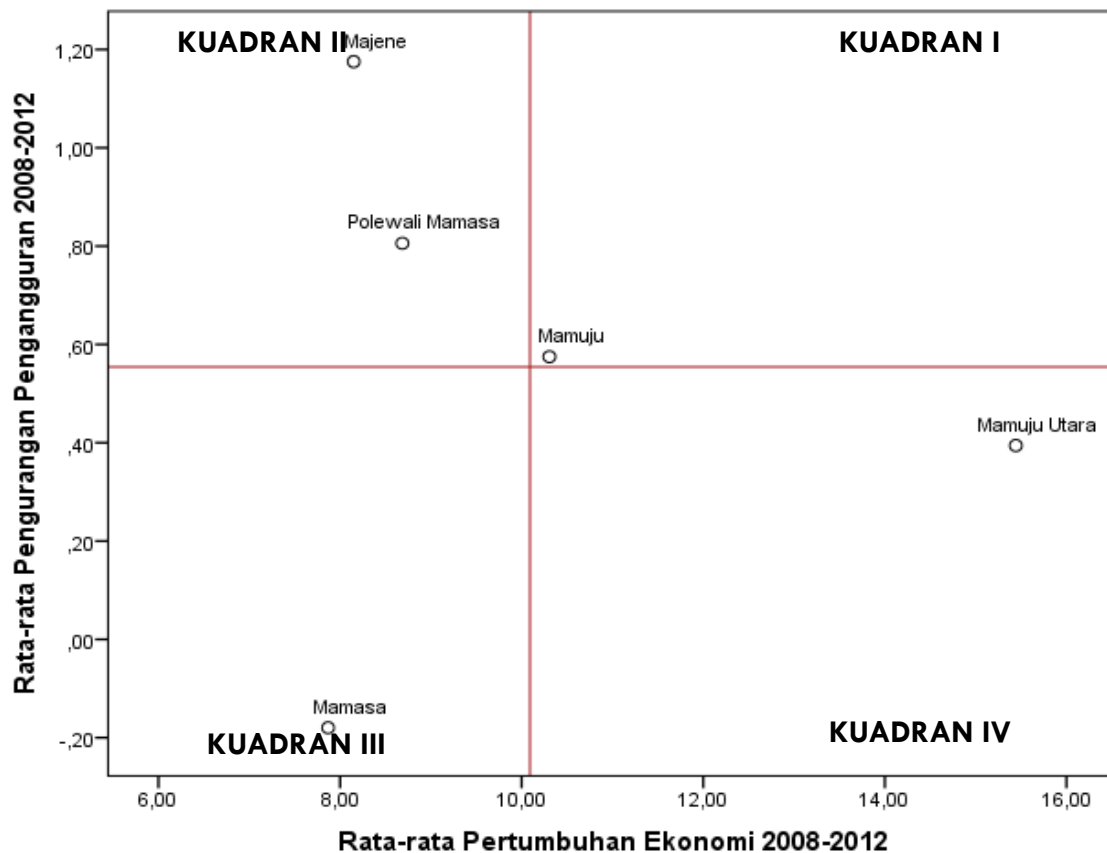
Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012.

*Pertama*, Kabupaten Mamuju terletak di kuadran I, termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh

pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

*Kedua*, Kabupaten , Majene dan Polewali Mamasa yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

**Gambar 7**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Ketiga*, Kabupaten Mamasa terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

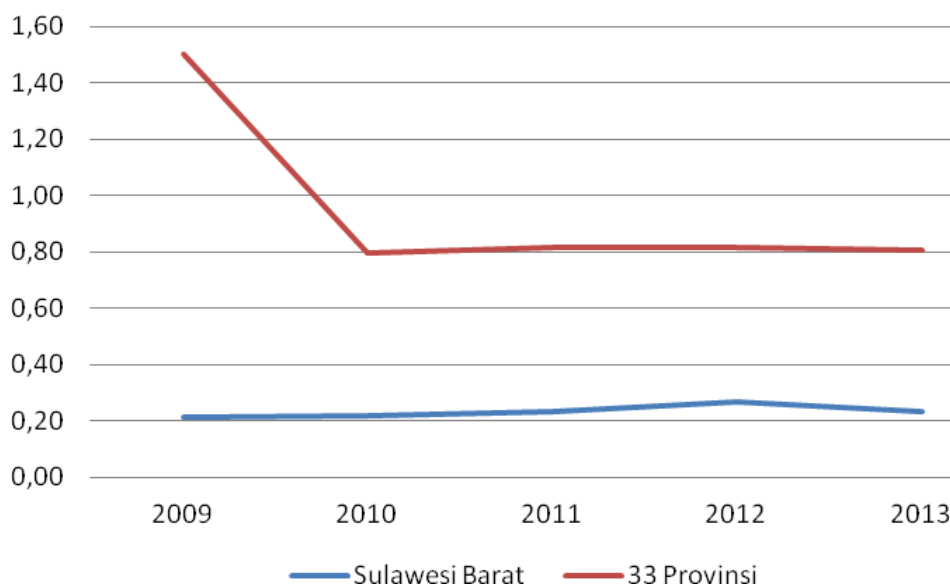
*Keempat*, Kabupaten Mamuju Utara terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut

termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

#### 4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang ditunjukkan dengan nilai indeks williamson dari tahun 2009-2013 tergolong rendah. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Rata-rata nilai indeks williamson 33 provinsi pada periode yang sama sebesar 0,95 cukup jauh berada di atas nilai masing-masing wilayah di Indonesia.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013**  
**di Sulawesi Barat**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat relatif merata, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Besarnya PDRB perkapita di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara selalu lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Barat. Tingginya PDRB perkapita kedua kabupaten ini karena potensi kekayaan alamnya di bidang pertambangan, pertanian, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, membaiknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan PDRB perkapita di daerah ini.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat 2007-2012 (000/jiwa)**

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Majene	5.655	6.747	7.549	8.947	9.720	10.584
Mamasa	5.066	6.550	7.586	8.528	9.555	10.441
Polewali Mandar	4.759	5.683	6.543	8.430	9.587	10.941
Mamuju	6.458	7.898	8.803	9.814	11.293	12.597
Mamuju Utara	7.164	9.116	10.192	12.274	14.956	16.275
<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>5.765</b>	<b>7.509</b>	<b>8.302</b>	<b>9.434</b>	<b>10.834</b>	<b>11.829</b>

Sumber: BPS, 2013

## C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

### 1. Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Pertanian

Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah agraris yang sebagian besar kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Pada tahun 2013 sektor pertanian masih mendominasi struktur perekonomian Sulawesi Barat, diikuti sektor jasa-jasa dan perdagangan (Tabel 2). Kinerja perekonomian Sulawesi Barat yang diukur berdasarkan kenaikan PDRB ADHK 2000 pada triwulan II tahun 2014 terhadap triwulan I tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 0,78 persen, dengan sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian. Beberapa potensi wilayah seperti perkebunan (kakao, kelapa sawit, rotan), pertanian, perikanan, dan kelautan merupakan modal utama Sulawesi Barat untuk membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Walaupun sektor pertanian merupakan sektor dengan proporsi terbesar dalam perekonomian, namun laju pertumbuhannya masih lebih rendah dibandingkan sektor lain, kemungkinan disebabkan rendahnya produktivitas pertanian.

**Tabel 2**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	47,44	46,22
2.	Pertambangan	0,88	1,01
3.	Industri Pengolahan	7,03	8,52
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,52	0,42
5.	Konstruksi	4,23	5,36
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	13,15	12,48
7.	Angkutan, Telekomunikasi	2,01	3,16
8.	Keuangan	5,73	7,39
9.	Jasa-jasa	19,00	15,43
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Apabila ditelusuri lebih lanjut, sektor basis daerah yang ditunjukkan melalui nilai *Location Quotient* (LQ) antara lain sektor pertanian dan jasa-jasa (Tabel 3). Tanaman perkebunan memiliki nilai LQ tertinggi 10,45, menunjukkan Sulawesi Barat memiliki

*proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk subsektor tersebut. Tingginya nilai LQ sektor pertanian didukung oleh kesesuaian iklim, jenis tanah, dan luas lahan yang potensial untuk mengembangkan pertanian berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

**Tabel 3**  
**Nilai LQ Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2012**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b>	3,48	3,40	3,59	3,62	3,62
a. Tanaman Bahan Makanan	2,66	2,47	2,70	2,60	2,58
b. Tanaman Perkebunan	9,20	9,47	9,98	10,45	10,45
c. Peternakan	1,34	1,30	1,37	1,35	1,31
d. Kehutanan	0,98	0,98	0,88	0,89	0,87
e. Perikanan	2,96	3,01	2,91	2,85	2,80
<b>2. Pertambangan dan Penggalian</b>	0,11	0,12	0,11	0,12	0,13
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	0,95	1,04	0,95	0,95	0,97
<b>3. Industri Pengolahan</b>	0,31	0,33	0,34	0,36	0,35
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,34	0,35	0,37	0,39	0,37
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	0,56	0,54	0,59	0,62	0,66
a. Listrik	0,80	0,83	0,88	0,91	0,96
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,25	0,24	0,43	0,40	0,57
<b>5. Konstruksi</b>	0,82	0,83	0,72	0,72	0,71
<b>6. Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	0,72	0,74	0,73	0,71	0,69
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,83	0,86	0,85	0,82	0,79
b. Hotel	0,07	0,07	0,06	0,08	0,07
c. Restoran	0,20	0,19	0,19	0,21	0,22
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	0,38	0,36	0,36	0,36	0,34
a. Pengangkutan	0,72	0,71	0,74	0,74	0,71
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	1,03	1,02	1,08	1,09	1,05
3). Angkutan Laut	2,01	2,15	2,31	2,37	2,21
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5). Angkutan Udara	0,04	0,04	0,11	0,12	0,13
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,12	0,11	0,10	0,11	0,11
b. Komunikasi	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
<b>8. Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perusahaan</b>	0,72	0,77	0,73	0,68	0,66

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
a. Bank	0,67	0,77	0,89	0,77	0,75
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,22	0,25	0,25	0,36	0,37
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	1,36	1,41	1,11	1,10	1,04
e. Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
<b>9. Jasa-jasa</b>	1,64	1,64	1,57	1,68	1,86
a. Pemerintahan Umum	3,66	3,66	3,56	3,87	4,45
b. Swasta	0,08	0,10	0,09	0,09	0,09
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,13	0,17	0,15	0,15	0,14
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,12	0,17	0,15	0,14	0,12
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Subsektor dengan nilai LQ tinggi antara lain tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, menunjukkan bahwa share subsektor tersebut untuk Provinsi Sulawesi Barat secara proporsional lebih tinggi dari nasional. Dengan kata lain Sulawesi Barat memiliki keunggulan komparatif pada sektor tersebut dibandingkan daerah-daerah lain. Untuk mendorong pertumbuhan, sektor ekonomi diupayakan lebih berorientasi pada industri pengolahan dan pelayanan jasa. Pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Barat penting karena sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan dibandingkan permintaan produk manufaktur yang lebih elastis terhadap peningkatan pendapatan.

Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, dan ketika situasi ekonomi telah membaik serta pendapatan masyarakat telah meningkat, permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Selain itu, sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah dan mendorong perkembangan sektor-sektor lain (multiplier effect), serta menciptakan lapangan kerja. Selama periode tahun 2010-2014, sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan adalah jasa-jasa, pertanian, angkutan dan telekomunikasi (Tabel 4). Sektor industri pengolahan perlu dikembangkan lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru serta menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor jasa-jasa yang kurang produktif.

**Tabel 4**  
**Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014**

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	323.361	354.350	30.989
2	Pertambangan	2.933	4.976	2.043
3	Industri Pengolahan	34.848	27.032	(7,816)
4	Listrik, Gas, Air	1.306	2.713	1.407
5	Bangunan	16.259	23.925	7.666
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	73.683	56.986	(16.697)
7	Angkutan & Telekomunikasi	9638	24.732	15.094
8	Keuangan	1.993	4.165	2.174
9	Jasa-Jasa	59.739	92.238	32.499
<b>Total</b>		<b>523.760</b>	<b>591.117</b>	<b>67.357</b>

Sumber: BPS, 2014

## 2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat adalah pada sektor konsumsi rumah tangga. Sementara itu sektor PMTB (investasi) yang sangat penting bagi pertumbuhan daerah hanya berkontribusi sebesar 12 persen (Tabel 5). Meskipun sektor konsumsi rumah tangga menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi, namun peran investasi semakin meningkat dan memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari konsumsi rumah tangga. Pada Triwulan II 2014 komponen PDRB menurut penggunaan yang memiliki laju pertumbuhan tinggi antara lain sektor PMTB dan ekspor impor (BPS, 2014)

**Tabel 5**  
**PDRB Menurut Penggunaan 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	61,23	54,24
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,23	12,41
3.	Konsumsi Pemerintah	28,84	22,55
4.	PMTB	12,17	9,75
5.	Perubahan Stok	0,84	0,82
6.	Ekspor	18,58	15,42
7.	Impor	22,87	18,19
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, 2013

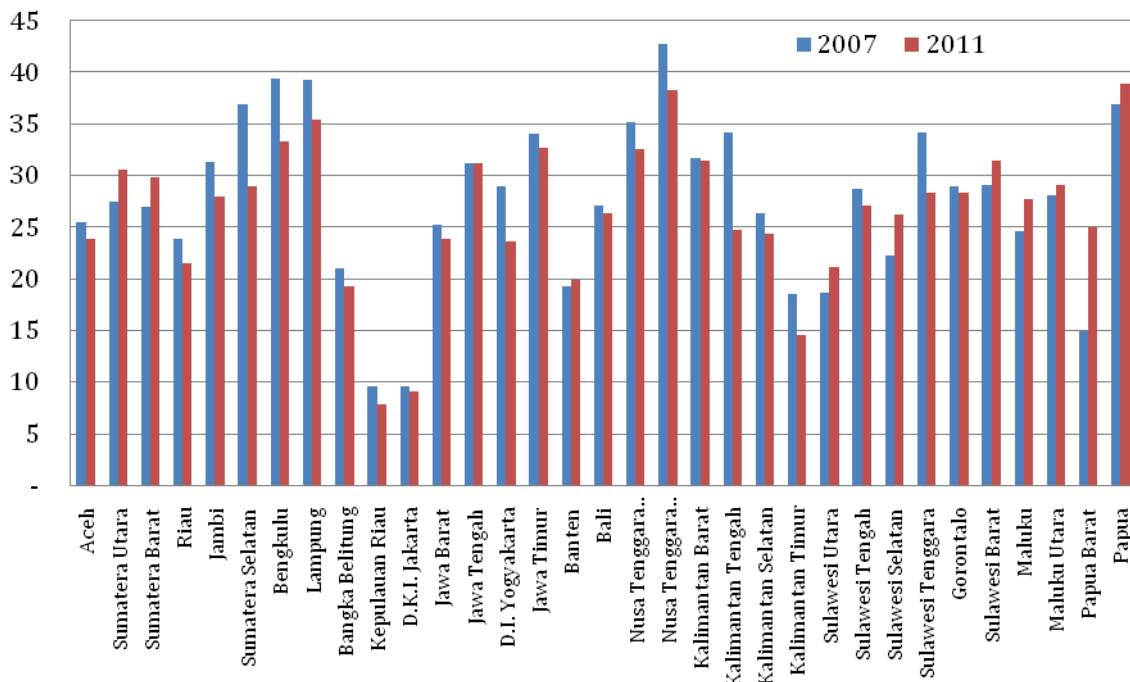
Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk berproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kemudahan perijinan dunia usaha, peningkatan sumber daya manusia, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana investasi.

### 3. Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja

Kualitas lapangan kerja yang tercipta selama periode tahun 2007-2011 di Sulawesi Barat relatif meningkat (Gambar 9). Tingginya persentase kemiskinan daerah yang diiringi dengan tingkat pengangguran rendah berkaitan dengan rendahnya kualitas pekerjaan yang tersedia di daerah. Rendahnya kualitas lapangan kerja terkait dengan tingginya kemiskinan dan tingkat pengangguran di daerah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, yaitu pekerja yang terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian tinggi sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi yang terjadi.

Karena adanya penumpukan tenaga kerja di bidang pertanian dan produktivitas pertanian yang rendah, kebijakan pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan sektor industri, yang pengembangannya diarahkan pada industri berbasis pertanian (agroindustri) yang didukung oleh agrobisnis

**Gambar 9**  
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

### 4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Ketersediaan jaringan jalan di Provinsi Sulawesi Barat diukur dari kerapatan jalan tergolong baik dan relatif lebih baik dari rata-rata nasional (Tabel 6). Posisi Sulawesi Barat berada di titik tengah Jalur Lintas Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Barat Makassar dan Manado. Secara keseluruhan wilayah Sulawesi Barat dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 6.819 km.



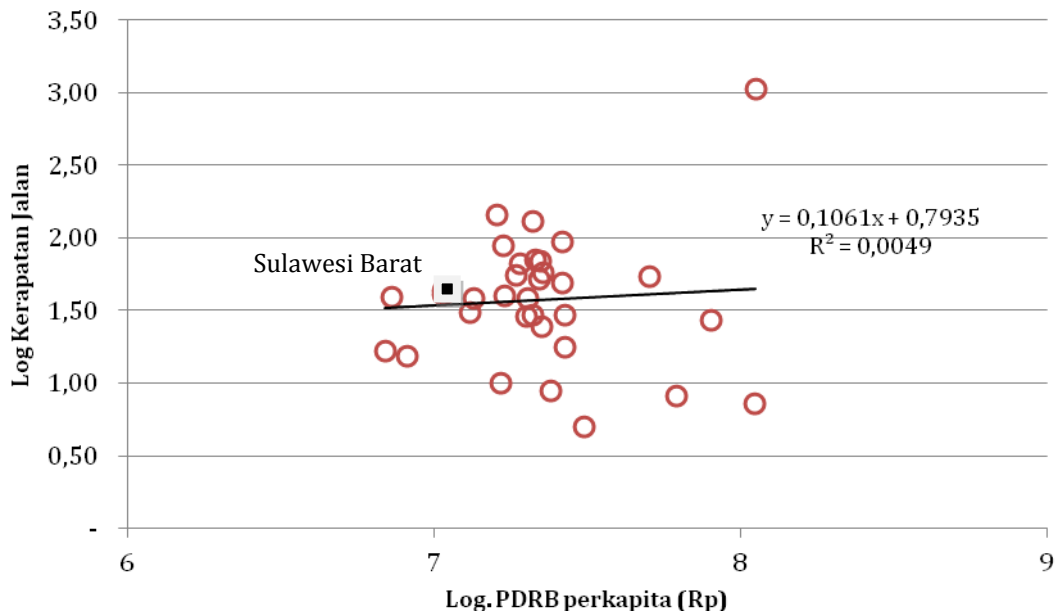
**Tabel 6**  
**Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012**

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
<b>16</b>	<b>Sulawesi Barat</b>	<b>17.012</b>	<b>40,62</b>
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
29	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	<b>Indonesia</b>	<b>33.531</b>	<b>25,99</b>

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Tingkat defisiensi infrastruktur wilayah diketahui dengan cara membandingkan tingkat pendapatan perkapita provinsi di Indonesia. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa terdapat korelasi antara kerapatan jalan dan tingkat pendapatan per kapita di suatu perekonomian. Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu perekonomian, maka kerapatan jalannya cenderung semakin tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Sulawesi Barat relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain. Dengan demikian panjang jalan bukanlah masalah utama bagi Sulawesi Barat.

**Gambar 10**  
**Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012**



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Sulawesi Barat yang belum beraspal sebanyak 19 persen (Tabel 7). Kondisi ini mengurangi daya dukung jalan bagi pergerakan barang. Dengan kondisi jalan yang buruk, waktu tempuh perjalanan akan meningkat sehingga meningkatkan biaya distribusi barang antardaerah, yang akhirnya akan menghambat perekonomian daerah.

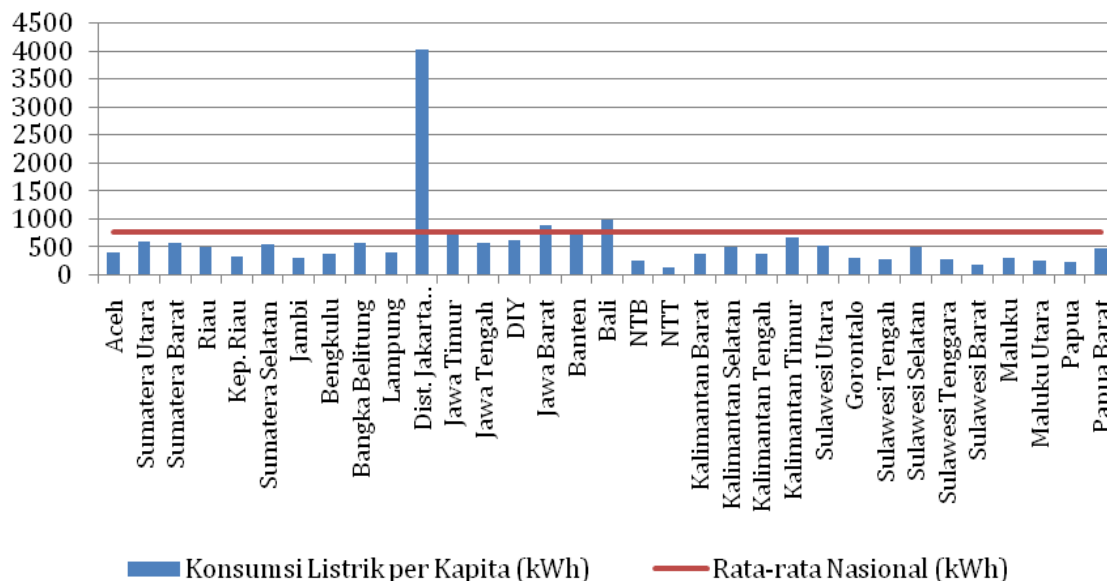
**Tabel 7**  
**Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012**

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN									
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya		Total	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Sulawesi Barat	359	81	47	11	33	8	2	0	441	100
Sulawesi	5.103	81	678	11	469	8	24	0	6.274	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2013

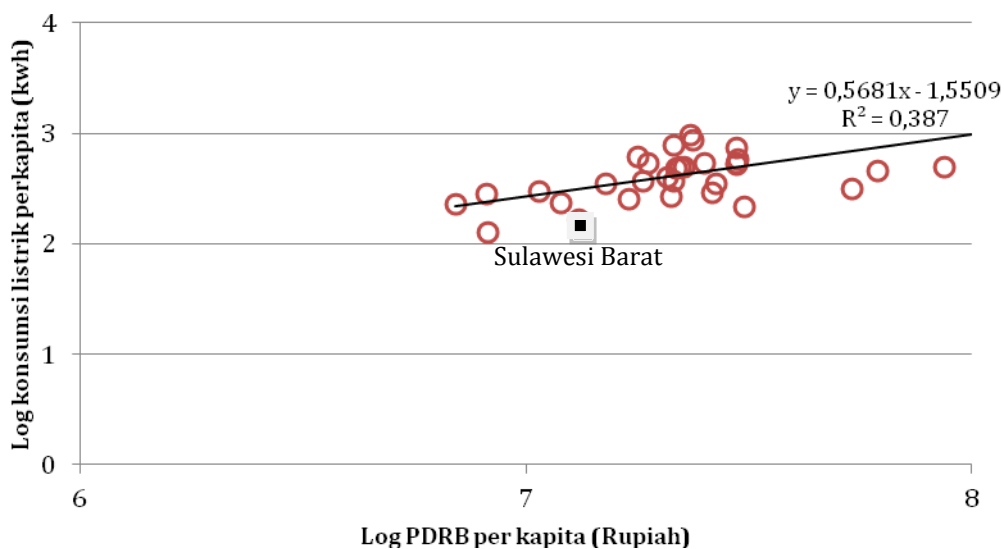
Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Sulawesi Barat termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi infrastruktur kelistrikan juga digunakan dengan cara membandingkan tingkat pendapatan perkapita provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dan konsumsi listrik (Gambar 12). Konsumsi listrik di Sulawesi Barat jauh lebih rendah dari konsumsi listrik provinsi lain. Tingkat konsumsi listrik Sulawesi Barat kurang dari 25 persen rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional.

**Gambar 11**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013**



Sumber: Statistik PLN, 2013

**Gambar 12**  
**Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013**



Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

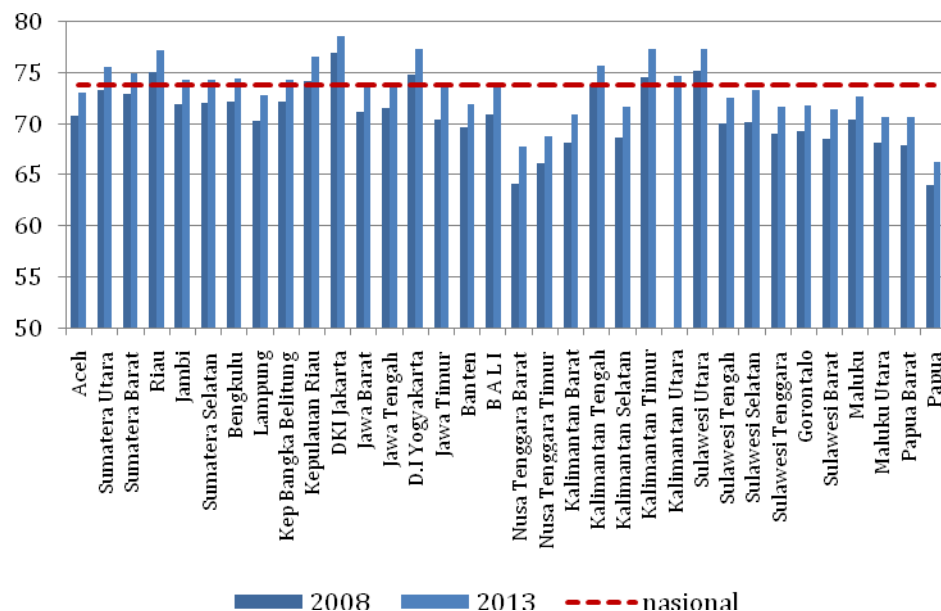
**5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008, walaupun masih di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13). Dari 34 provinsi di Indonesia, IPM Sulawesi Barat berada pada peringkat 28 dengan nilai IPM sebesar 71,41 pada tahun 2013. Sumber daya

manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mungkin menghambat pertumbuhan Sulawesi Barat adalah kualitas sumber daya manusianya yang relatif rendah. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 67,4 tahun pada tahun 2008 menjadi 68,34 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat meningkat dari 6,99 tahun pada 2008 menjadi 7,35 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Sulawesi Barat pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 87,31 menjadi 90,54 persen.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mungkin menghambat pertumbuhan Sulawesi Barat adalah kualitas sumber daya manusianya yang relatif rendah. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 67,4 tahun pada tahun 2008 menjadi 68,34 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat meningkat dari 6,99 tahun pada 2008 menjadi 7,35 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Sulawesi Barat pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 87,31 menjadi 90,54 persen.

**Gambar 13**  
**Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013**



Sumber: BPS, 2013

**Tabel 8**  
**Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	311.475	334.792	23.317
2	SMTp	80.509	85.138	4.629
3	SMTA Umum	78.739	127.421	48.682
5	Diploma I/II/III/Akademi	11.610	14.347	2.737
6	Universitas	13.626	39.015	25.389
<b>Total</b>		<b>495.959</b>	<b>600.713</b>	<b>104.754</b>

Sumber: BPS, 2014

Perbaikan kualitas sumber daya manusia juga tercermin dari komposisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 20,97 persen pada tahun 2008 menjadi 30,10 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Meski lulusan SMP ke bawah masih bertambah, namun demikian penambahan lebih besar terjadi untuk angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas. Perbaikan kualitas angkatan kerja ini menjadi modal berharga untuk mendukung pengembangan sektor industri berwujud agroindustri dan agribisnis.

## 6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi turut menentukan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi pada sektor-sektor produktif, yang sebagian dikonsumsi maupun ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank umum dan BPR di Sulawesi Barat selalu lebih besar dari satu dan cenderung meningkat angka rasionya (Tabel 9). Sulawesi Barat mengalami keterbatasan tabungan sebagai sumber permodalan. Jikapada tahun 2009 rasio pinjaman terhadap simpanan di Sulawesi Barat sebesar 1,41, pada tahun 2013 rasio ini meningkat menjadi 1,73; lebih besar dari wilayah Sulawesi dan nasional pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan potensi simpanan masyarakat di provinsi ini terbatas.

**Tabel 9**  
**Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013**

	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Sulawesi Barat	3.015	5.210	1,73	0,65
Sulawesi	104.086	153.356	1,47	
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

Sumber: BPS, 2013

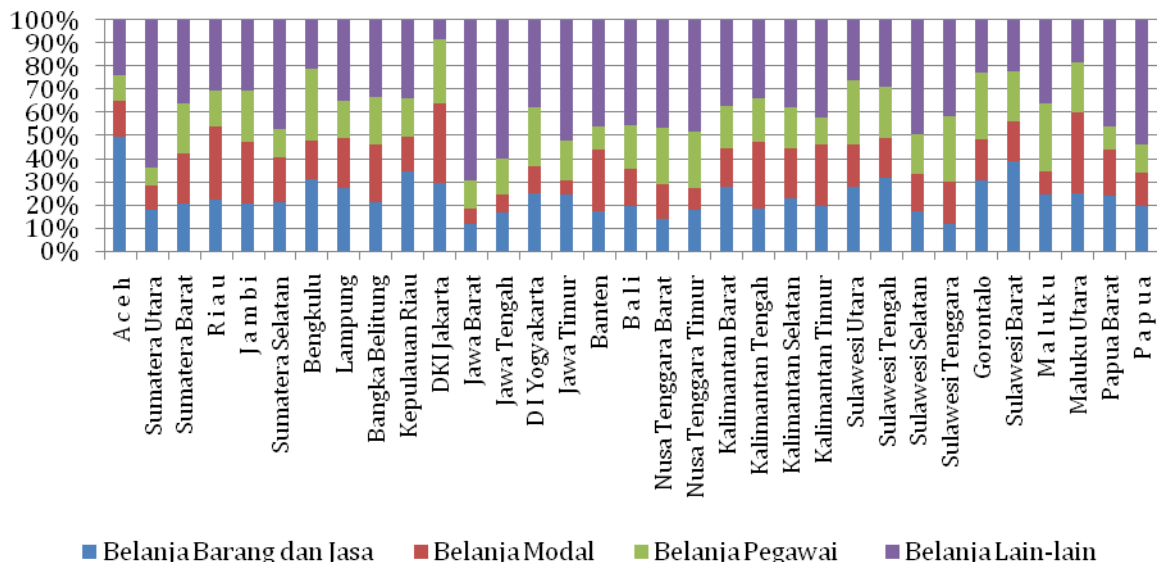
Rasio investasi (PMTB) terhadap simpanan masyarakat di Sulawesi Barat masih kurang dari satu, berarti potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Sulawesi Barat adalah bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan. Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif.

## 7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

APBD merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan total APBD provinsi dan kabupaten/ kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Sulawesi Barat sebesar 17,39 persen, sementara porsi belanja pegawai yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung memiliki porsi sebesar 21,78 persen dari total belanja pemerintah (Gambar 14).

Karena belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian, perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah yang lebih mengarah pada belanja modal perlu dikembangkan. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

**Gambar 14**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013**



Sumber: BPS, 2013

## D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Pertumbuhan daerah Sulawesi Barat tahun 2015 memiliki prospek baik, dengan didukung beberapa modal pembangunan yang dimiliki. Daerah dengan tingkat pendapatan perkapita relatif rendah pada umumnya akan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena investasi akan memberikan tambahan output (*marginal product of capital*) yang lebih tinggi. Pertumbuhan daerah di Sulawesi Barat ditentukan oleh realisasi investasi di daerah tersebut.

Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami peningkatan dari angka 0,31 menjadi 0,35, meskipun masih jauh dari peningkatan angka nasional dari 0,35 menjadi 0,4. Rendahnya tingkat kesenjangan ekonomi akan mendukung upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan. Percepatan pengembangan ekonomi Sulawesi diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang besar dan bervariasi, mulai dari pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, peternakan sampai perkebunan. Sektor pertanian komoditi unggulannya berasal dari sub sektor tanaman perkebunan, dengan komoditi berupa kelapa, kakao dan kopi. Sub sektor kehutanan dengan komoditi rotan, dan sub sektor perikanan komoditi yang diunggulkan adalah perikanan tangkap. Komoditi penunjang untuk sektor pertanian yaitu sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi kelapa sawit dan kopi, sub sektor perikanan meliputi budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya kolam.

Di sektor pertambangan dan energi, potensi sumber daya alam meliputi batu bara, bijih besi, tembaga, mangan, pasir kuarsa, dan lain-lain. Posisi Sulawesi Barat yang strategis karena berada tepat di tengah jalur lintas Sulawesi memiliki akses terhadap pelabuhan dan perdagangan internasional dan domestik. Selain proyek-proyek infrastruktur utama yang secara langsung melewati Sulawesi Barat, proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan lainnya juga diperkirakan akan hanya memberi manfaat besar pada Sulawesi Barat.

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 8,1 – 10,4 persen dapat tercapai. Pada triwulan IV tahun 2014 sebagai indikator mengindikasikan kinerja ekonomi di Sulawesi Barat terus membaik. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat telah meningkat pada akhir 2014 melebihi perkiraan sebelumnya. Hal ini juga didukung meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas pertambangan setelah diberlakukannya ijin ekspor mineral bagi penambang besar.
2. Kondisi terakhir kemiskinan Sulawesi Barat tahun 2013 masih berada pada angka 12,83 persen, sementara itu sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dari buku III RPJMN pada tahun 2019 adalah sebesar 10,2 – 7,1 persen, sehingga diperlukan upaya konsisten dalam mempertahankan penurunan tingkat kemiskinan sesuai sasaran Buku III RPJMN 2015-2019. Selama kurun waktu 2014-2019 Sulawesi

Barat harus menurunkan persentase penduduk miskin 5,73 poin persentase atau 0,96 poin persentase per tahun.

3. Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan untuk mencapai sasaran utama pembangunan, pemerintah harus memperhatikan dinamika lingkungan baik internal maupun eksternal. Perlambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal perekonomian daerah.

## **E. Penutup**

### **1. Isu Strategis Daerah**

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dengan sarana perdagangan yang optimal dan kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas yang mendukung pengembangan sektor pertanian secara luas
- c. Peningkatan investasi di daerah
- d. Pengembangan transportasi darat, laut dan udara
- e. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- g. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha
- h. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

### **2. Rekomendasi Kebijakan**

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Peningkatan produktivitas pertanian melalui pemberdayaan petani dan nelayan terkait perbaikan faktor produksi melalui peningkatan panca usaha tani, penyuluhan dan promosi komoditas unggulan daerah.
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan dan peningkatan suplai listrik di wilayah;
- e. Peningkatan pendidikan masyarakat dengan meningkatkan akses pendidikan khususnya sekolah umum dan kejuruan;
- f. Peningkatan porsi dan kualitas belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;



- g. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.